



## PEMKAB SIAPKAN TRANSASKI NON TUNAI DI 2018

Pemerintah Kabupaten (Pembup) Kapuas Hulu melakukan persiapan untuk penerapan transaksi non tunai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mematangkan penerapan transaksi tersebut, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kapuas Hulu menggelar sosialisasi bagi staf serta pejabat keuangan di Aula Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Selasa (16/1).

**KEPALA** BKD Kapuas Hulu, Mohd Zaini mengatakan, pihaknya melakukan

kegiatan sosialisasi tersebut untuk penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, sebab akan diterapkan di 2018. Kegiatan sosialisasi nontunai, kata Zaini, sudah pernah dilakukan pada 2017. Ini tindak lanjutnya, cuma lebih memperdalam terkait teknis implementasi non tunai. Penjelasan terkait transaksi itu akan dipaparkan dari pihak bank pemerintah daerah, sebagai penyalur dana.

"Transaksi non tunai ini harus diterapkan karena bagian dari Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan aksi korupsi," ucap Zaini.

Zaini menilai penerapan transaksi non tunai di Kapuas Hulu, secara teknis ini belum bisa maksimal. Terutama, diakui dia, di kecamatan-kecamatan. "Ada

beberapa kecamatan belum bisa terapkan transaksi non tunai, sebab bank terkait belum ada di beberapa kecamatan," ujarnya.

Zaini menambahkan, berdasarkan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang Jasa, maksimal pengadaan barang dan jasa yang *cash* adalah Rp1 juta, apabila pembeliannya diatas jumlah tersebut maka harus non tunai. Kemudian terkait oprasional OPD di luar Sekretariat Daerah dan DPRD, maksimal Rp50 juta *cash*, sementara Sekretariat Daerah dan DPRD maksimal Rp100 juta, selebihnya harus non tunai. "Untuk transaksi kegiatan di OPD maksimal Rp2,5 juta, kalau Sekretariat Daerah dan DPRD maksimal Rp5 juta yang bayarnya *cash*, kalau jumlah diatasnya itu non tunai semua," papar

Zaini.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero, menuturkan, dirinya berharap dari kegiatan sosialisasi non tunai dapat memaparkan prosedur yang benar bagi pejabat keuangan di lingkungan Pemkab. "Karena pemateri dari Bank Pemerintah Daerah, kita harapkan bisa menjelaskan teknis transaksi non tunai sesuai aturan berlaku," tegasnya.

Wabup menginginkan, sistem non tunai tidak mempersulit aparatur pemerintahan, baik di kecamatan atau pun desa. Sebab, dia menambahkan, pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan dengan baik. "Kita berharap di kecamatan dapat dipermudah untuk transaksi nontunai. Kalau bisa sampai ke tingkat desa," ujarnya.

Wabup menambahkan ta-



MUSTA'AN/PONTIANAK POST

**SOSIALISASI:** Badan Keuangan Daerah Kapuas Hulu menggelar rapat sosialisasi non tunai kepada seluruh OPD di Aula Setda setempat.

hun anggaran 2017 sudah selesai, karena itu pengelolaan keuangan seperti pertanggungjawaban harus terselesaikan. Ia pun mengatakan dirinya menunggu laporan dari OPD yang ada. "Saya belum terima tentang realisasi pertanggungjawaban, penggunaan APBD 2017, saya ingin lihat serapan anggaranya," ungkap Wabup.

Lebih lanjut, Wabup mengatakan pada 2016 serapan anggaran 96 persen. Dia belum tahu berapa serapan anggaran di 2017. Wabup mengaku khawatir serapan anggaran minim, karena ada pengerjaan yang belum selesai. "Paling lambat laporan (pertanggungjawaban) itu masuk Januari ke saya, sebab seharusnya 31 Desember

2017 itu sudah selesai pelaporannya. Kalau habis bulan ini (Januari) tidak selesai, kinerja kita turun," tegasnya lagi.

Wabup mengungkapkan, Pemda Kapuas Hulu tahun 2016 lalu masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Ini dampak realisasi yang kita lakukan," ujarnya. (aan)